

**RENCANA KERJA
(RENJA)
2022**



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder) termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memerlukan sistem perencanaan yang baik melalui tahapan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan berkesinambungan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan semua pihak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menjadi kewajiban pemerintah provinsi/kabupaten dan kota untuk menyusun Perencanaan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam undang-undang tersebut diatur batas waktu penyusunan RPJMD yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Bupati/ Wakil Bupati terpilih dilantik. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2021–2026 memuat penjabaran visi misi dan program kepala daerah terpilih serta penjabaran visi misi dan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali selama tahun 2021–2026 di latar belakang pandangan tentang pembangunan daerah sebelumnya antara lain :

1. Pelaksanaan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian diakui telah membawa kemajuan baik fisik maupun bagi kesejahteraan masyarakat. Selain adanya keberhasilan, pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi terdapat kekurangan. Dengan kondisi perjalanan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dimasa kini dan mendatang;
2. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali tahun 2021–2026 dilihat dari proses dan hasil-hasil pembangunan selama ini adanya beberapa catatan kondisi awal daerah yang perlu mendapatkan perhatian untuk

menyongsong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Boyolali mendatang, antara lain :

- a) Daya dukung geografis wilayah Kabupaten Boyolali seluas kurang lebih 101.510,10 hektar merupakan daerah agraris diantaranya seluas kurang lebih 40,29 % merupakan lahan kritis dan lahan kering yang kurang subur meliputi kecamatan Sambu, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Kemusu dan Juwangi;
- b) Kondisi geografis, bentuk wilayah dan prasarana dan sarana kurang mendukung bagi pemasaran serta daya tarik investasi. Di lain pihak kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Kemusu dan Selo cukup potensi sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang belum didaya gunakan;
- c) Pembangunan selama ini belum berhasil mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Sektor pertanian selama ini masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB, dan dari segi mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah sebagai petani sehingga Boyolali sampai saat ini tetap sebagai daerah pertanian;
- d) Masalah kependudukan yang dihadapi Kabupaten Boyolali yaitu pertumbuhan penduduk secara absolut masih cukup besar, penyebaran penduduk yang tidak merata dan sebagian besar angkatan kerja (usia produktif) yaitu kurang lebih 501.502 orang atau diatas 80% dari total angkatan kerja kurang lebih 600.000 orang berpendidikan rendah (lulusan SD/ sederajat dan atau tidak tamat/tidak sekolah);
- e) Rasa persatuan dan kesatuan, toleransi dan semangat membangun dari masyarakat merupakan faktor non ekonomi yang cukup positif dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Boyolali;
- f) Masih adanya kesenjangan budaya dan etos kerja serta mekanisme kesisteman, baik dilembaga eksekutif, legeslatif maupun masyarakat;
- g) Keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatannya masih belum terpecahkan;

h) Tetap perlunya perhatian terhadap kondisi keamanan dan kestabilan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - m. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - n. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - p. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
- x. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 109);
- y. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

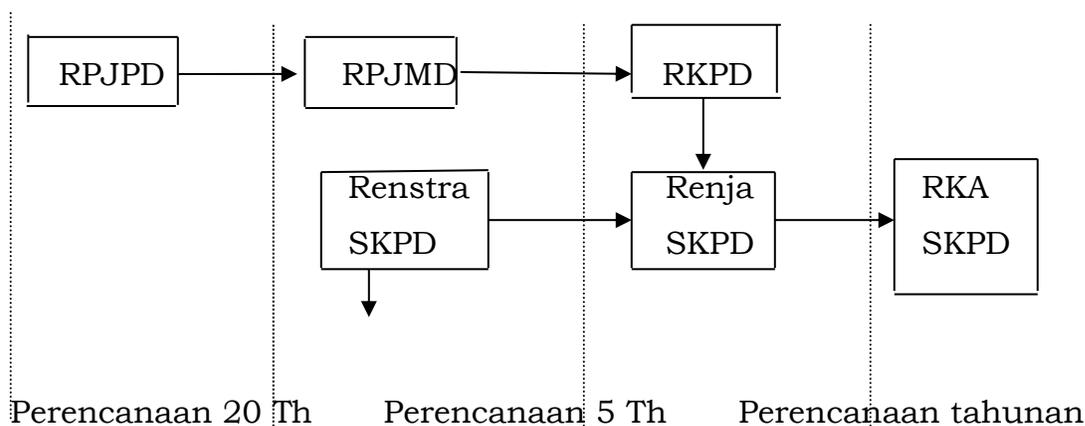
1.3.1 Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) -

RPJMD dan perencanaan Tahunan - RKPD. Lebih operasional setiap SKPD juga wajib menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan- Renstra SKPD- dan dokumen perencanaan tahunan- Renja SKPD. Renja SKPD bukanlah dokumen perencanaan yang berdiri sendiri. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah. Kedudukan Renja SKPD sangat penting bagi Renstra SKPD, karena keberhasilan target-target tahunan yang ada di dalam Renja SKPD akan menentukan keberhasilan target-target perencanaan jangka menengah (2 tahunan) yang tertuang didalam Renstra SKPD disamping bisa untuk memberikan evaluasi tahunan.

Sebagaimana rencana tahunan SKPD maka penyusunannya harus berpedoman pada rencana tahunan daerah-RKPD. Sebagai rencana tahunan SKPD maka penyusunannya harus berpedoman pada rencana tahunan daerah RKPD. Sebagai dokumen perencanaan maka Renja SKPD akan dipakai sebagai dasar bagi penyusunan anggaran - RKA SKPD. Renja SKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan penganggaran berbasis kinerja.

1.3.2 Keterkaitan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



a. Tugas Pokok, Fungsi Dan Visi-Misi SKPD

Tugas Pokok

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Fungsi organisasi

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang Perdagangan dan Peindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi Bupati Boyolali Tahun 2021 – 2026

”Boyolali Maju Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)

Misi SKPD

Penjabaran misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dimaksudkan untuk :

- Menjabarkan perencanaan jangka menengah – Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali ke dalam perencanaan tahunan;
- Operasionalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- Pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022;

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

- 1) Untuk menciptakan keharmonisan dan keterpaduan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali melalui kesepahaman dalam perencanaan dan penanganan kegiatan;
- 2) Menyusun pedoman bagi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dalam merencanakan dan menganggarkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali;
- 3) Mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun;
- 4) Mewujudkan keterpaduan antara aspirasi masyarakat, kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boyolali;
- 5) Untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi kerakyatan dengan didukung oleh industri, perdagangan dan pengelolaan pasar yang tangguh bertumpu pada mekanisme pasar, dengan pendekatan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berdampak luas bagi pengembangan sektor lain serta dapat dikembangkan secara efisien;
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar dalam memasuki era globalisasi.

b. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), digunakan Metodologi Penyusunan melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politik

Pendekatan ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021–2026;

2. Pendekatan teknokratik

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan kerangka ilmiah dari Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali/ RPJMD Kabupaten Boyolali.

3. Pendekatan atas bawah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.

4. Pendekatan bawah atas

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan mendasarkan masukan-masukan perencanaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. Pendekatan partisipatif

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan pelibatan atau partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hasil musyawarah pembangunan desa mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Melalui proses ini diperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang mana dari satu bab ke bab berikutnya merupakan suatu urutan pemikiran dan pengkajian aspek-aspek yang diperlukan hingga perumusan kegiatan-kegiatan.

Secara singkat bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perdagangan dan Perindustrian

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.1. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sebagaimana bisa kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

No	Program / Kegiatan	Indikator (output)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Administrasi Perkantoran	bulan	12	12	100
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	95.65	100
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terselesaikannya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tahun	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sesuai apa yang sudah dijadikan indikator dalam Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. Indikator Kinerja: *Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola dll).*

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk melalui pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat/ tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali;
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2021 sebesar 95 unit sampai dengan akhir TW IV terealisasi 88 unit atau capaian 93%. Faktor pendukung berupa adanya kegiatan pembangunan pasar rakyat/ tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali yang sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan dan telah dilaksanakan sebagai berikut: Pembangunan pasar: relokasi pasar cepogo tahap X (kios dan saluran depan pasar), relokasi pasar cepogo tahap XII (kios dan saluran depan pasar), Relokasi pasar hewan sunggingan VIII di Jelok (los dan saluran depan pasar), relokasi pasar hewan sunggingan X di Jelok (los dan saluran depan pasar), pasar shelter simpang pengging (kios dan saluran depan pasar), pembangunan gazebo simpang pengging (kios dan saluran depan pasar), relokasi pasar hewan purworejo di Jeron dan saluran depan pasar, relokasi pasar juwangi dan saluran depan pasar revitalisasi pasar Tambak tahap V.
3. Faktor Pendukung: kegiatan ini didukung dengan anggaran yang cukup dari APBD meskipun ada refocusing.
4. Faktor penghambat: dikarenakan adanya proses lelang pasar Nogosari yang gagal untuk mendapatkan pemenang sedangkan waktunya tidak memungkinkan untuk mengadakan lelang ulang.
5. Alternatif pemecahan masalah : lelang dilaksanakan lebih awal sehingga apabila terjadi gagal lelang masih bisa dilaksanakan lelang ulang.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 95 unit sampai akhir TW IV dapat tercapai 93%.

B. Indikator Kinerja: *Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali*

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengelolaan pendapatan retribusi pasar milik Pemerintah Daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar umum maupun pasar hewan yang dikelola Pemkab Boyolali.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2021 sebesar Rp. 7.534.344.000,00 adanya perubahan target menjadi Rp. 7.934.344.000,00 sampai dengan akhir TW IV tercapai Rp. 13.294860.152,00 atau 167,56%.
3. Faktor pendukung: keberhasilan capaian indikator kinerja ini berupa adanya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penarikan retribusi pasar dan adanya pembangunan pasar dan perbaikan sarana dan prasarana pasar baik pasar umum maupun pasar hewan.
4. Faktor penghambat: masih kurangnya tenaga penarik retribusi pasar dan cukup banyak kios pasar di lantai dua yang tidak laku karena lokasi kurang strategis.
5. Alternatif pemecahan masalah dengan mengusulkan penambahan tenaga penarik retribusi dan perintisan e-retribusi serta kemudahan dalam menyewakan kios.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.934.344.000,00 sampai akhir TW IV tercapai 167,56% atau Rp 13.294.860.152,00.

C. Indikator Kerja: *Lokasi pedagang pasar, PKL, dan asongan yang tertib dan tertata*

1. Hasil: sampai akhir TW IV tahun 2021 terealisasi 100%.
2. Faktor pendukung berupa kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan selama pandemi sebagai berikut :
 - Adanya pembentukan TIM dalam rangka penataan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang pasar se wilayah pasar di Kabupaten Boyolali.
 - Menyusun jadwal penataan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang pasar dan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang pasar.
3. Faktor penghambat adalah belum tertibnya pedagang kaki lima dan asongan dalam berjualan di zona yang telah ditentukan terutama pedagang oprokan/ musiman dimasa pandemi.

4. Alternatif pemecahan masalah:
 - Intensifikasi dan peningkatan koordinasi dalam rangka penataan pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan pedagang besar se wilayah pasar di Kabupaten Boyolali;
5. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 30 lokasi sampai akhir TW IV tercapai 100%.

D. Indikator Kerja: *Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen*

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan kegiatan operasional dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2021 sebesar 4.200 pelaku usaha dan konsumen, dan sampai dengan akhir TW IV terealisasi 8.816 pelaku usaha, sehingga belum semua pelaku usaha dan konsumen terlayani dalam program perlindungan konsumen ini.
3. Faktor Pendukung :
 - Telah terbentuknya UPT metrologi Kabupaten Boyolali;
 - Adanya pendataan UTTP yang dilaksanakan di 19 kecamatan;
 - Perintisan pengadaan sarpras metrologi;
4. Faktor penghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana kemetrolgian, belum adanya kantor UPT Kemetrolgian dan belum lengkapnya peralatan standar kemetrolgian, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kegiatan kemetrolgian legal.
5. Alternatif pemecahan masalah:
 - Penyediaan kantor UPT Metrologi dan pengadaan peralatan metrologi untuk pelayanan tera dan tera ulang;
 - Sosialisasi yang intensif di setiap kecamatan kepada pelaku usaha dan konsumen.
6. Kesimpulan:

Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 4.200 pelaku usaha dan konsumen sampai dengan akhir semester IV dapat tercapai 210%.

E. Indikator Kerja: Nilai ekspor barang (USD)

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program peningkatan dan pengembangan ekspor dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor.
 - b. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional.
 - c. Pembangunan promosi perdagangan internasional.
2. Hasil: dari target RPJMD tahun 2021 sebesar USD 165.917 di akhir semester TW IV terealisasi USD 121.137.
3. Faktor pendukung: komunikasi yang baik antara dinas dengan pelaku usaha.
4. Faktor penghambat: banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan kegiatan ekspor impor karena masa pandemi covid-19, di tingkat pelaku usaha mengalami kelesuan/penurunan produksi komoditas ekspor;
5. Alternatif pemecahan masalah: diperlukan adanya monitoring ke pelaku usaha/ perusahaan untuk mengetahui ada kegiatan/ tidaknya serta melaksanakan Kegiatan sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor kepada pelaku usaha.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar USD 165.917 dapat tercapai 73%.

F. Indikator Kerja: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

1. Capaian indikator ini melalui program penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan monitoring, pembinaan, serta pengawasan terhadap sektor perdagangan.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan kalangan peritel sehingga hasil-hasil produk IKM bisa ikut dipajang di ruang-ruang peritel.
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2021 sebanyak 14,50% yang tercapai menunggu release dari BPS.
3. Faktor Pendukung berupa adanya kegiatan: monitoring yang tetap dilaksanakan meskipun ditengah suasana pandemi covid-19.
4. Faktor penghambat: tidak adanya anggaran atau karena rasionalisasi anggaran di masa pandemi covid-19.;

5. Alternatif pemecahan masalah: meningkatkan pelaksanaan monitoring, pembinaan serta pengawasan;
6. Kesimpulan: Data BPS belum direlease

G. Indikator Kerja: *Meningkatnya IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya*

1. Untuk melaksanakan indikator ini melalui program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2021 sebesar 430 IKM/orang tercapai 299 IKM/orang atau terealisasi 69,53%.
3. Faktor Pendukung adanya dukungan dari Pusat dan Provinsi
4. Faktor penghambat: tidak adanya anggaran atau karena rasionalisasi anggaran di masa pandemi covid-19.
5. Alternatif pemecahan masalah:
 - Koordinasi dengan Provinsi/ Pusat untuk membuat program kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota
 - Meskipun capaian indikator tidak tercapai tetapi tetap memantau dan memonitor IKM yang ada.
6. Kesimpulan:
 - Target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 430 IKM/ orang, terealisasi 69,53%.

H. Indikator Kerja : *Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan*

1. Untuk melaksanakan indikator melalui program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri;
2. Hasil dari target RPJMD tahun 2021 sebesar 60 IKM/orang, sampai dengan TW IV terealisasi 100%.
3. Faktor pendukung
4. Faktor penghambat: tidak adanya anggaran atau karena rasionalisasi anggaran di masa pandemi covid-19.
5. Alternatif pemecahan masalah: peningkatan fasilitas/ pembinaan bagi IKM;
6. Kesimpulan: target RPJMD pada tahun 2021 sebesar 60KM/ orang dapat terealisasi 100%.

Dari semua uraian diatas dapat kita lihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DISPERINDAG KABUPATEN BOYOLALI

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	-	3,68 – 5,15	4,18 – 5,40	4,68 – 5,65	5,18 – 5,90	5,68 – 6,15	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar Petani (NTP)	-	-	2	2,5	3	3,5	4					
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	800	823	833	893	903					

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Isu-Isu strategis diperoleh dengan mengakomodasi isu pelayanan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan isu utama Kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali yaitu:

1. Meningkatkan daya saing industri yang berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam sektor perekonomian dan perlunya peningkatan penggunaan sumber daya/ bahan baku lokal;
3. Pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan konsumen dalam rangka pengembangan tertib niaga dan perlindungan konsumen;
4. Peningkatan bina usaha perdagangan, kelancaran sistem distribusi barang, pemberdayaan konsumen, standarisasi dan tertb ukur ekspor;
5. Peningkatan ketersediaan sarana perdagangan yang representatif dan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang ekonomi lemah;
6. Pembentukan kawasan peruntukan industri;
7. Pengembangan variasi barang ekspor, peningkatan promosi perdagangan dan penyederhanaan prosedur ekspor untuk meningkatkan ekspor daerah.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing perdagangan dan perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Belum adaya sarpras dan tenaga ahli dalam rangka pembentukan UPT Metrologi;
2. Sebagian industri memiliki ketergantungan terhadap peralatan/ mesin, bahan baku dan penolong, serta barang setengah jadi dari luar daerah bahkan luar negeri;
3. Meningkatnya persaingan dalam pemasaran produk seiring makin kuatnya arus perdagangan bebas;

4. Belum optimalnya sistem cluster berdasarkan kompetensi inti daerah;
5. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah dan belum berwawasan lingkungan;
6. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan, profesionalisme, inovasi pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk;
7. Masih terbatasnya sarpras perdagangan yang representatif;
8. Belum tertata dan tertibnya lokasi tempat usaha bagi pedagang ekonomi lemah/PKL.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mempercepat dan mengefektifkan pembangunan industri, perdagangan, dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Boyolali, perlu diciptakan suasana kondusif yang merupakan jembatan strategis untuk memecahkan berbagai kendala pembangunan ekonomi Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 antara lain:

1. Meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja industri sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing di pasar global;
2. Memperbaiki struktur industri berkaitan dengan jaringan pemasok bahan baku, bahan pendukung, barang setengah jadi dan penguasaan pasar;
3. Menjadikan Industri Kecil Menengah sebagai basis industri Kabupaten Boyolali oleh karena itu Industri Kecil Menengah didorong agar mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif, mampu mengembangkan pasar produknya dan mampu memenuhi sumber daya yang diperlukan;
4. Mendukung perkuatan daya saing produk-produk industri manufaktur agar lebih mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dan mendukung upaya perlindungan konsumen;
5. Mengintensifkan pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Boyolali secara terpadu;
6. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan;
7. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penarikan retribusi daerah;

8. Terciptannya iklim usaha yang kondusif agar dapat mendorong minat investor;
9. Kemudahan mendapatkan akses permodalan terutama bagi industri kecil dan menengah;
10. Keterpaduan pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara komprehensif;
11. Dukungan infrastruktur yang memadai dalam pembangunan ekonomi.

Rancangan Awal Program dan Kegiatan SKPD

Tabel 2.3

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2022

SKPD : DISDAGPERIN

No	Sumber Dana	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Volume / Target	Lokasi Kegiatan	Ket
1	APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.548.297.700		Kab. Byl	
		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.847.266.000	100 Persen	Kab. Byl	
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	836.196.700	100 Persen	Kab. Byl	
		3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.403.000	100 Persen	Kab. Byl	
		4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.430.000	100 Persen	Kab. Byl	
2	APBD	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	11.159.400			
		1 Pengendalian Harga , dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	11.159.400	2 kali	Kab. Byl	
3	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	405.000.000			
		1 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000	1 Tahun	Kab. Byl	

4	APBD	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		31.525.000			
		1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	31.525.000	13.033 UTP	Kab. Byl	
5	APBD & APBN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		26.211.900			
		1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	26.211.900	50 Pelaku Usaha	Kab. Byl	
6	APBD	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3.559.059.000			
		1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	36.637.000	450 IKM	Kab. Byl	
JUMLAH ANGGARAN				19.581.253.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung semua kegiatan yang diemban oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

Kegiatan pokok dari program ini antara lain:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;

3. Program Pengembangan Ekspor:
 - a. Pameran Dagang Nasional.

4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen:
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri:
 - a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota;

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kerangka Regulasi

- UUD 1945 pasal 33 ayat 1;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perindustrian;
- Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perubahan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 227/M.Dag/Per/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga;
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M.Dag/Per/7/2006 tentang Perubahan Atas Lampiran Per Men Nomor 03/M.Dag/Per/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian;
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M.Dag/Per/3/2006 tentang Perubahan Peraturan Mendag Nomor 04/M.Dag/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Barang Berbahaya;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/Men.Dag/Per/10/2006 tentang Tanda Tera Tahun 2007-07-18 Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep 16/1996 tentang Surat Keterangan Asal Barang Ekspor Indonesia;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M.Dag/Per/12/2006 tentang Penerbitan API;
- Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar;

- Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Laboratorium;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 505/KPTS/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
- Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 618/MPP/Kep/10/2004 tentang Perubahan Keputusan Menperindag tentang SKA;
- Keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang angka Pengenal Importir (API);
- Kepmen Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pedoman Penumbuhan Pengembangan Sentra UKM.

3.1.2 Kerangka Pelayanan Umum

Terwujudnya Bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih baik makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5% dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5%
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di perbagai wilayah Indonesia.

Sektor Pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif dalam upaya menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah terus digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setempat.

3.1.3. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah

a. Kebijakan

Meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta meningkatkan kemandirian dan daya saing dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, dalam arti luas, Industri Kecil Menengah dan/atau Usaha Kecil Menengah dan pariwisata

b. Strategi

- Memperkuat agrobisnis dan agro industri di pedesaan dengan memfasilitasi petani dan stackholder untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, memperluas akses pasar, permodalan serta memperkuat kinerja kelembagaan pedesaan.
- Memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan iklim kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi.
- Meningkatkan daya saing produk UKM/IKM di Pasar global dengan menerapkan standar produksi internasional, memfasilitasi promosi yang sitimatis didalam dan luar negeri serta membantu pengembangan sitem penjaminan sesuai ketentuan perbankan dan pranata sosial ekonomi.

3.1.4. Strategi Dan Kebijakan Daerah

a. Kerangka Pelayanan Umum Dan Strategi

Peraturan kembali manejemen pemerintah daerah yang dinamis untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, profesionalis dengan semangat kebersamaan berdasarkan jiwa, nilai dan konsensus dasar untuk tetap tegaknya NKRI, tetap berkembangnya pluralitas dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

b. Kebijakan

- Penataan kembali sitem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Penghormatan dan penguatan sistem kemasyarakatan yang majemuk
- Pembangunan Kabupaten Boyolali di segala bidang kehidupan.

3.1.5. Strategi Dan Kebijakan SKPD Disdagperin

a. Kerangka Pelayanan Umum

- 1) Pemerintahan deregulasi dan pemangkasan birokrasi peraturan dan prosedur perijinan serta pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai usaha maupun tahap operasi bisnis.
- 2) Upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dan pengusaha, serta dilaksanakan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dilaksanakan dan tidak diskriminatif.
- 3) Memperbaiki kebijakan Investasi dengan membuat cetak biru pengembangan kebijakan investasi yang menitik beratkan pada peningkatan partisipasi aktif pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat, merumuskan sistem intensif dalam kebijakan investasi, meningkatkan fasilitasi penyediaan informasi dan promosi investasi, serta menggalang kerjasama pengembangan investasi antar daerah.
- 4) Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum dalam hal pelaksanaan mitra usaha, menjaga hak kepemilikan seperti kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kebijakan peningkatan daya saing industri manufaktur dan perdagangan diarahkan sebagai berikut:

- 1) Memantau perbaikan iklim usaha di segala mata rantai produksi dan distribusi, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait maupun mitra swasta.
- 2) Mengembangkan industri manufaktur yang difokuskan kepada sub sector industri manufaktur yang memiliki

keunggulan komparatif dan kompetitif. Sehingga lebih memperkuat struktur industri, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan *multiplier value* pada masing-masing subsektor. Menggalakkan penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri.

- 3) Pengembangan dan penguatan sentra-sentra industri dan klaster-klaster yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain: menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan dasar misalnya makanan/ minuman dan obat-obatan/jamu, mengolah hasil pertanian dan memiliki potensi pengembangan ekspor.
 - 4) Fasilitasi Pemerintah daerah dalam bentuk investasi dan pelayanan publik mencakup antara lain penelitian dan pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan manajemen produksi, peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja, layanan informasi pasar produk baik dalam negeri maupun luar negeri, serta penyediaan infrastruktur pendukung.
 - 5) Peningkatan kualitas produk-produk industri, peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor, serta peningkatan kinerja eksportir dan calon eksportir.
- b. Arah Kebijakan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- 1) Meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi dan fasilitasi akses IKM terhadap sumber permodalan khususnya perbankan.
 - 2) Pengembangan penelitian atas teknologi tepat guna untuk IKM melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.
 - 3) Mengembangkan IKM melalui pendekatan klaster disektor agribisnis dan agrobisnis disertai peningkatan produktivitas IKM agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
 - 4) Mengembangkan usaha mikro dengan arah dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 5) Mengembangkan kualitas SDM pengelola IKM serta meningkatkan kinerja revitalisasi tatanan kelembagaan.

- 6) Penyediaan sarana prasarana perdagangan bagi IKM terutama renovasi dan pembangunan pasar tradisional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Program SKPD Jangka Menengah yaitu:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun Perencanaan Jangka Pendek/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 sehingga lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3.2.2. Renja SKPD mempunyai fungsi yaitu :

1. Penjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antara SKPD antara fungsi maupun antara Pusat dan Propinsi.
3. Penjamin tercapinya penggunaan sumber daya secara efisien berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKPD Tahun 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2022	APBD Prov 2022	APBN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3													
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	30			Perdagangan									
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar								
3	30	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100 %	13.847.268.000	0	0	13.847.268.000	100 %	0
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun		12 Bulan	11.611.845.000	0	0	11.611.845.000	12 Bulan	0
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak		12 Bulan	2.235.423.000	0	0	2.235.423.000	12 Bulan	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2022	APBD Prov 2022	APBN 2022		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan administrasi perrkantoran perangkat daerah		100 %	836.196.700	0	0	836.196.700		100 %	0
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	6.000.000			6.000.000		12 Bulan	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga		100,00	25.000.000			25.000.000		100,00	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM/ logistik kantor		12 bulan	295.703.000			295.703.000		12 bulan	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		100,00	135.694.900			135.694.900		100,00	
				Penyediaan bahan / Material	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor		12 bulan	123.218.800			123.218.800		12 bulan	
				Fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman		1,00	123.580.000			123.580.000		1,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2022	APBD Prov 2022	APBN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah		12 bulan	127.000.000			127.000.000		12 bulan	
3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi perkantoran perangkat daerah			404.403.000			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat		100,00	3.490.000			3.490.000		100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon		12 bulan	394.820.000			394.820.000		12 bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum		100,00	6.093.000			6.093.000		100,00	
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah			460.430.000			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab 2022	APBD Prov 2022	APBN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100,00	235.430.000			235.430.000		100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100,00	30.000.000			30.000.000		100,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	195.000.000			195.000.000		100,00	
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase koefisiensi variasi harga antar waktu			11.159.400		12	
3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	koefisien harga antar waktu			11.159.400		12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	APBD Prov 2022	APBN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar murah yang dilaksanakan		2 Kali	11.159.400			11.159.400		2	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor			405.000.000			405.000.000			
3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.		1 Tahun	405.000.000			405.000.000			
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan		1 Tahun	405.000.000			405.000.000		1	
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur			31.525.000			31.525.000		57	
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang		13.033 UTTP	31.525.000			31.525.000		57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	APBD Prov 2022	APBN 2022	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang yang sah		13.033 UTTP	31.525.000			31.525.000		13.033 UTTP	
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk olahan Susu yang dipasarkan			26.211.900		20	
3	30	07	2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk olahan susu yang dipasarkan		50 Pelaku Usaha	26.211.900		2	
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk olahan susu yang produknya dipromosikan		50 Pelaku Usaha	26.211.900		2	
3	31			Perindustrian							
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih			3.559.059.000		4.67	
3	31	02	2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terlatih		450 IKM	3.559.059.000		450 IKM	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan		450 IKM	3.559.059.000		450 IKM	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel. 4.1.

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Boyolali

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkeg	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Subkeg	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kab (Rp)	APB D Prov (Rp)	APBN (Rp)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3											
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	30										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3	30	03									
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Kab. Boyolali	84.09	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000		86.36	26.472.000.000
3	30	03	2.0 1								
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan yang kondisinya baik	Kab. Boyolali	37	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000		38	26.472.000.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	Kab. Boyolali	1 Paket	0	-	26.472.000.000	26.472.000.000		1	26.472.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
3	30	06	2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	Kab. Boyolali	62	20.000.000			20.000.000	-	67	20.000.000
			01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang yang sah	Kab. Boyolali	13.033 UTTP	20.000.000			20.000.000	-	13.033 UTTP	20.000.000
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)		0.72	22.790.000			22.790.000	-	0.77	45.213.000
3	30	07	2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha yang memperoleh promosi		60 pelaku usaha	22.790.000			22.790.000	-	70 pelaku usaha	45.213.000
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi		50 pelaku usaha	22.790.000	--	-	22.790.000	-	50 pelaku usaha	45.213.000
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								-		
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai standar		100	15.548.297.700			15.548.297.700	-	100	20.394.161.000
3	30	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100	13.847.268.000			13.847.268.000	-	100	13.847.268.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	Kab. Boyolali	12 bulan	11.611.845.000	-	-	11.611.845.000	-	12 bulan	11.611.845.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji THL/Tenaga Kontrak	Kab. Boyolali	12 bulan	2.235.423.000	-	-	2.235.423.000	-	12 bulan	2.235.423.000
3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah		100	836.196.700			836.196.700	-	100	634.205.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Boyolali	100	6.000.000	-	-	6.000.000	-	12 bulan	6.000.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Kab. Boyolali	100	25.000.000	-	-	25.000.000	-	100	25.000.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM/logistik kantor	Kab. Boyolali	100	295.703.000	-	-	295.703.000	-	100	264.023.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Boyolali	100	135.694.900	-	-	135.694.900	-	100	30.000.000
				Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/koran	Kab. Boyolali	100	123.218.800	-	-	123.218.800	-	100	110.542.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Kab. Boyolali	100	123.580.000	-	-	123.580.000	-	100	98.640.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan SPPD dalam daerah dan luar daerah	Kab. Boyolali	100	127.000.000	-	-	127.000.000	-	12 bulan	100.000.000
3	31	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				60.000.000			60.000.000			60.000.000
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Boyolali		10.000.000			10.000.000			10.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Boyolali		50.000.000			50.000.000			50.000.000
3	31	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan layanan administrasi		100	404.403.000			404.403.000	-	100	535.078.000
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kab. Boyolali	100	3.490.000	-	-	3.490.000	-	100	3.140.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon	Kab. Boyolali	100	394.820.000	-	-	394.820.000	-	100	525.845.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum	Kab. Boyolali	100	6.093.000	-	-	6.093.000	-	100	6.093.000
3	31	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		100	460.430.000			460.430.000	-	100	460.430.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Boyolali	100	235.430.000	-	-	235.430.000	-	100	235.430.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Boyolali	100	15.000.000			15.000.000		100	15.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Boyolali	100	30.000.000	-	-	30.000.000	-	100	30.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Boyolali	100	195.000.000	-	-	195.000.000	-	100	195.000.000
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING				11.159.000			11.159.000			20.000.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
3	30	04	2.0 2	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				11.159.000			11.159.000			20.000.000
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pasar murah yang dilaksanakan	Kab. Boyolali		11.159.000			11.159.000			20.000.000
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase peningkatan pelaku usaha ekspor		12,16	405.000.000			405.000.000			470.000.000
3	30	05	2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kab/Kota.			405.000.000			405.000.000			470.000.000
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah pameran dagang yang dilaksanakan	Tingkat Nasional	5 pelaku usaha	405.000.000			405.000.000			470.000.000
3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	Kab. Boyolali	62	31.525.000			31.525.000			20.000.000
3	30	06	2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase alat UTTP yang ditera/tera ulang sah	Kab. Boyolali	62	31.525.000			31.525.000			20.000.000
			01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang yang sah	Kab. Boyolali	13.033 UTTP	31.525.000			31.525.000			20.000.000
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi (Permendagri 86 Tahun 2020)		0.72	26.211.900			26.211.900			45.213.000
3	30	07	2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha yang memperoleh promosi		60 pelaku usaha	26.211.900			26.211.900			45.213.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	Kab. Boyolali	50 pelaku usaha	26.211.900			26.211.900			45.213.000
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih		4.78	3.559.059.000	-	-	3.559.059.000	-	4.88	3.559.059.000
3	31	02	2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terlatih		510 IKM	3.559.059.000	-	-	3.559.059.000	-	560 IKM	3.559.059.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	Kab. Boyolali	450 IKM	3.559.059.000	-	-	3.559.059.000	-	450 IKM	3.559.059.000
				TOTAL				19.581.253.000			19.581.253.000			24.508.433.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman bagi segenap aparatur dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Pengelolaan Pasar serta menggunakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini merupakan pejabaran dari Visi, Misi dan program Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah periode 2021- 2026 yang dilaksanakan secara langsung.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tersebut, disamping memerlukan dukungan dari peran serta masyarakat dan dunia usaha beserta aparatur pemerintah diperlukan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin para penyelenggaraan pembangunan. Keberhasilan tersebut tercermin pada kualitas dan profesional dalam pengolahan pengelolaan pembangunan yang terdiri dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta kondisi yang mantap dengan instansi terkait untuk mendukung kelancaran kinerja.

Dengan demikian hasil yang dicapai dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Boyolali, 2022

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI



KARSINO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621215 198503 1 013